



RENJA TAHUN 2024



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. MOJOKERTO

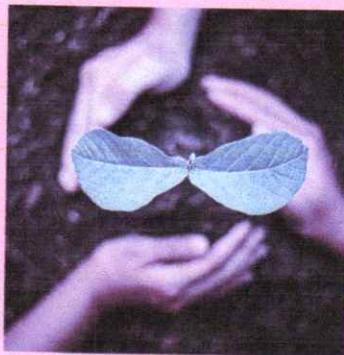
Jl. PEMUDA NO. 55B
MOJOSARI KAB. MOJOKERTO, TELP (0321) 593178

<https://dlh.mojokertokab.go.id>





RENJA TAHUN 2024



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. MOJOKERTO**

JI. PEMUDA NO. 55B
MOJOSARI KAB. MOJOKERTO, TELP (0321) 593178

<https://dlh.mojokertokab.go.id>



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Rankhir Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, serta mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 menggambarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Demikian kami berharap dengan telah disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Dinas Lingkungan Hidup ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Mojokerto, Juni 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. ZAQQI

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19711019 199302 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Landasan Hukum	10
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	17
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	78
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..	83
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	85
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	94
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	101
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	101
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	106
3.3 Program dan Kegiatan	110
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	145
BAB V PENUTUP	179



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah ... dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun berjalan (tahun 2022).....	20
Tabel 2.	T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	79
Tabel 3.	T-C.31 Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024.....	87
Tabel 4.	T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	96
Tabel 5.	T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto	118
Tabel 6.	Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	146



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 660/3483/416-110/2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO**



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jln. Pemuda No. 55 B Mojokerto, Kode Pos 61382 Jawa Timur
Telp. / Fax (0321) 593178 Mojosari – Mojokerto
Website: <http://www.dlh.mojokertokab.go.id>
Email: blhkabupatenmojokerto@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO
Nomor : 660/3483/416-110/2023
Tentang
RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023
KABUPATEN MOJOKERTO**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO

- a. Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Perlu menyusun Rencana Kerja (Renja).
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
- b. Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 18 Tahun 2020 tentang RPJMD Tahun 2020-2024
10. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan RKPD;
12. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dimutakhirkan terakhir KepMendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Permendagri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Mojokerto Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Mojokerto.

22. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 34 Tahun 2021 sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab Mojokerto.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Rancangan Akhir Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja Instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan perangkat daerah.

KETIGA : Sistematika Renja Organisasi Perangkat Daerah memuat :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal Juni 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Mojokerto



Drs. ZAQQI

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19711019 199302 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, serta mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 dengan tetap memperhatikan hasil kinerja yang dicapai sebelumnya, permasalahan yang ada dan isu strategis yang dihadapi. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 berdasarkan KepMendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019.

Berdasarkan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga periode Kepala Daerah terpilih tahun 2021-2026.

Oleh karena itu untuk mewujudkan perencanaan pembangunan secara menyeluruh, efektif dan efisien, maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, factual dan realistis.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4700);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 -2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupten Mojokerto Tahun 2016–2021.
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Mojokerto.
21. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 34 Tahun 2021 sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah :

- a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 dan mensinkronkan dengan program dan kegiatan dari provinsi dan pusat;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam rangka pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 bertujuan untuk menghadirkan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024 sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 agar pembangunan di kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten agar berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan .

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Pendaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto menggambarkan sejumlah target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Organisasi dan Pendaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, fungsi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDG's (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Berisi Perbandingan antara Rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisi daftar usulan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam bentuk kamus usulan untuk mengakomodir usulan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha.

BAB III. TUJUAN, SASARAN

3.1. Tujuan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan/atau visi misi Kepala Daerah terpilih.

3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:

- a) Visi dan misi kepala daerah terpilih;
- b) Pencapaian SDG's;
- c) Pengentasan kemiskinan;
- d) Pencapaian NSPK dan SPM;
- e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
- f) Pengembangan daerah terisolir;
- g) Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:

- a) Jumlah program dan jumlah kegiatan;
- b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
- c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar 14.271.961367,- realisasi penyerapan anggaran sebesar 13.527.844.691,- dengan persentase 94,78%. Realisasi capaian kinerjanya dengan target indikator nilai SAKIP sebesar 80,74 (A) realisasi kinerja sebesar 88,11 (A) dengan persentase sebesar 109,12%.
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar 150.000.000,- dan terealisasi sebesar 136.734.000,- atau 91,12% dengan capaian kinerja sebesar 81,24%
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan dengan anggaran sebesar 982.003.584,- dan terealisasi sebesar 926.504.112,- atau 94,34% dengan capaian kinerja sebesar 69,6% dan anggaran sebesar 70.000.000,- dan terealisasi sebesar 67.082.500,- atau 95,83% dan capaian kinerja sebesar 40,21%.
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan anggaran sebesar 3.165.000.0000,- dan terealisasi sebesar 2.894.182.308,- atau 91,44% dengan capaian kinerja sebesar 64,89.
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan anggaran sebesar 45.000.000,- dan terealisasi sebesar 25.837.000,- atau 57,42% dengan

capaian kinerja sebesar 100% artinya 1 kegiatan yang terdiri dari 1 sub kegiatan yang diampu program ini telah terlaksana dengan baik.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan anggaran sebesar 195.000.000,- dan terealisasi sebesar 192.897.200,- atau 98,92 % dengan capaian kinerja sebesar 952,3.
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat dengan anggaran sebesar 160.000.000,- dan terealisasi sebesar 143.161.534,- atau 89,47% dengan capaian kinerja sebesar 37%.
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat dengan anggaran sebesar 40.000.000,- dan terealisasi sebesar 33.131.000,- atau 82,82% dengan capaian kinerja sebesar 43,02%.
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar 55.000.000,- dan terealisasi sebesar 27.950.999,- atau 50,82 % dengan capaian kinerja sebesar 100% artinya 1 kegiatan yang terdiri dari dari 2 sub kegiatan yang diampu program ini telah terlaksana dengan cukup baik.
10. Program Pengelolaan Persampahan dengan anggaran sebesar 6.168.113.950,- dan terealisasi sebesar 5.823.951.516,- atau 94,42% dengan capaian kinerja sebesar 48,52%.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (Tw I Tahun 2023) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tertera pada **tabel (TC-29)** sebagai berikut ini:

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (TW I Tahun 2023)**

Kabupaten Mojokerto

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			9	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (Triwulan I Tahun 2023)	
					6	7	8		10	11
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outomes)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah Tahun 2023)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
				No						

RENJA 2024

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai; Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah; Indeks Profesionalitas ASN	95%, 90%, 74%			95%, 90%, 74%	95%, 92,16%, 74,64%	100 %, 102,2%, 100,86%	100%	90%	95%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	90%			90%	100%	111%	100%	90%	95%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun sesuai ketentuan	3	Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan SAKIP yang Disusun sesuai Ketentuan; Jumlah Peserta Kegiatan Evaluasi	5	Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	4 Dokumen	

		Kinerja Peringkat Daerah Tahunan									
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Kali		100%	100%	100%	100%	50%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan		14 bulan	14 bulan	100%	14 Bulan	7 Bulan		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan	12	Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%			90%	90%	100%	100%	47%		

RENJA 2024

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Lingkungan Hidup yang Disediakan (Laptop, Printer, Scanner, dll)	13	Jenis		13 jenis	13 jenis	100%	5 Jenis	3 Jenis	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Pelaksanaan Rapat	500	Kotak		500 kotak	500 kotak	100%	298 kotak	270 Kotak	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	9	Jenis		9 jenis	9 jenis	100%	7 jenis	1 jenis	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah dan Jenis Pengadaan Alat Tulis Kantor Rutin	25	Jenis		25 jenis	25 jenis	100%	25 jenis	20 jenis	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah dan Jenis Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Fasilitasi Kunjungan	200	Kotak		200 kotak	200 kotak	100%	149 kotak	145 kotak	

		Tamu									
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	392	Kali		392 kali	392 kali	100%	344 kali	112 kali	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100%	100%	100%	100%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Uji Udara (Impenger, TSP, TCLP, Weather Station, PM 10 dan PM 2,5)	7	unit		7 unit	7 Unit	100%			
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah peralatan uji air (penggandaan sparepart, alat yang rusak dan penambahan alat uji)	1	paket		1 paket	-	100%			

RENJA 2024

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%			90%	90%	100%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pemenuhan rekening/tagihan telepon, listrik dan air yang terbayar	12 bulan			12 bulan	12 bulan	100%			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Administrasi Keuangan selama 12 Bulan, Jumlah Jasa Tenaga Kerja Administrasi Kebersihan selama 12 Bulan	8 orang/bulan	Bulan		8 orang/bulan	8 orang/bulan	100%	10 orang/bulan	60 orang/6bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80%	Bulan		80%	80%	100%			

RENJA 2024

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan untuk Pengesahan Perpanjangan STNK dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Lapangan (Roda 4, Roda 2 dan Roda 3) Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2 (BBM dan Service)	40, 22	Unit		40 unit 22 unit	40 unit 22 unit	100%			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor DLH yang kurang layak	1	unit gedung		1 unit gedung	1 unit gedung	100%			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor dan peralatan kerja lapangan	6	jenis		6 jenis	6 jenis	100%			

RENJA 2024

	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto yang Tersusun sebagai Dasar Penentuan Kebijakan	90%			90%	88%	98%	54,36%		
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten /Kota	Persentase Tersusunnya Rencana PPLH dalam Mendukung Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan	90%	Bulan		90%	90%	100%	64,20%		
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten /Kota	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi RPPLH Kab/Kota	2 kali	Gedung		2 kali	3 kali dilakukan pembinaan	150%			
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	Persentase Pembinaan Penyelenggaraan KLHS yang Terlaksana	1	Gedung		1	1	100%	11,11%		

RENJA 2024

	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Jumlah Penyelenggaraan KLHS kepada Institusi dan / atau Masyarakat	1	kali		1 kali	3 kali dilakukan pembinaan	300%	2 Kali		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Persentase peningkatan kualitas air, udara dan tanah lahan	80%			80%	78%	97.500%	43,96%		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten yang terlaksana	75%			75%	73%	97%	57,56%		

RENJA 2024

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, air, Udara, dan Laut	Jumlah rekomendasi Teknis ,jumlah titik uji kualitas air bersih jumlah titik uji kualitas badan air,jumlah titik uji,kualitas limbah cair,jumlah titik uji kualitas udara	1 Titik 15 Rekomendasi 1 Kali Kegiatan 15 Titik 0 Titik 0 Titik 44 Titik			1 Titik 15 Rekomendasi 1 Kali Kegiatan 15 Titik 0 Titik 0 Titik 44 Titik	0 rekom teknis, 0 titik uji air bersih, 0 titik uji ABA, 15 titik uji limbah UMKM, 0 titik uji udara desa lomba berseri tingkat kabupaten, 54 titik uji emisi kendaraan, 1x pembinaan UMKM		48 titik Air badan air, 17 titik Air Limbah, 4 titik kualitas udara	12 titik Air Badan Air, 8 titik Air Limbah	25%
		Jumlah pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dengan titik pantau uji limbah cair industri (CBH CHT)		Kali							



RENJA 2024

		Jumlah pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dengan titik pantau uji limbah cair rumah sakit dan puskesmas (CBH CHT)									
		Jumlah pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan kegiatan peringatan hari bumi/hari lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat									
		Jumlah pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan rekomendasi teknis izin pembuangan limbah cair yang									



		diterbitkan									
		Jumlah pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap evaluasi kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa									
		Jumlah pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup pada masyarakat melalui pendataan titik pantau lokasi limbah UMKM dan uji kualitas limbah cairnya									

**RENJA 2024**

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan Inventarisasi dan Penyusunan Profil Emisi Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan pembinaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1 Dokumen 2 kali pembinaan			1 Dokumen 2 kali pembinaan	pembinaan mitigasi terlaksana 2 kali - 1 dokumen laporan pemantauan udara -50.000 bibit bambu, 6X sosialisasi wanatani bambu 12x sekolah lapang wanatani bambu	100%			
--	---	-------------------------------	--	--	-------------------------------	---	------	--	--	--

RENJA 2024

	<p>Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Jasa Usaha Pengujian Laboratorium Lingkungan dalam Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan dengan diperolehnya sertifikat kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan</p>	<p>1963 Kali Pengujian, 25 Sertifikat</p>	<p>Unit</p>		<p>1963 Kali Pengujian, 25 Sertifikat</p>	<p>2192 kali pengujian, 37 sertifikat</p>	<p>112%</p>	<p>2000 kali pengujian</p>	<p>1002 kali pengujian</p>	<p>50%</p>
	<p>Penanggung Jawaban Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p>	<p>Persentase Jumlah Wilayah yang Terfasilitasi Sistem Informasi Kondisi akan Pencemaran / Kerusakan Lingkungan</p>	<p>50%</p>			<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>	<p>5,56%</p>		

RENJA 2024

Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat melalui kegiatan penyusunan dokumen IKPLHD	1	Dokumen		1 Dokumen	tersedia 1 dokumen IKPLHD	100%	1 laporan, 5 papan, 4 lokasi	-	12,24%
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Badan Air dan Lahan Kritis yang Terpulihkan	32,29 %			32,29 %			-	-	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas area untuk keanekaragaman hayati							61,05%		
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten /Kota	Persentase luas area kabupaten untuk keanekaragaman hayati yang dikelola							61,05%		

RENJA 2024

	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah pohon yang ditanam dan dihibahkan (1 paket reboisasi dan 1 paket konservasi)	2	paket		2 paket	2 Paket	100%	250 pohon		
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Taman Kota dalam Keadaan Bersih dan Terawat Setiap Hari (Operasional Tenaga Pertamanan)	75295	m2 / 3 Kecamatan		75295 m2 / 3 Kecamatan	75295 m2 / 3 Kecamatan	100%	14 Lokasi	14 lokasi/bulan	36%
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah kebutuhan peralatan operasional kebersihan dan pertamanan	1	Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1200 Unit	600 unit	35%
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH	Persentase limbah, bahan berbahaya, beracun dan pertamanan (B3) yang dapat dikendalikan	30%			30%	28%	93%	100%		

	B3)										
	Penyimpanan sementara limbah B3	Presentase limbah B3 yang dikelola dalam 1(satu) Kabupaten mojokerto	30%			30%	28 %	93%	62,66%		
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Tekhnis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan limbah B3 dan dokumen lingkungan hidup	1	kegiatan		1 kegiatan	1 Kegiatan	100%	60 usaha dan kegiatan	25 usahan dan kegiatan	41%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN	Persentase pengawasan pelaku usaha dan kegiatan yang memiliki izin	25%	Paket		25%	14,16%	57%	57,27%		

<p>IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</p>										
<p>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota</p>	<p>Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin</p>	<p>90%</p>			<p>90%</p>	<p>57%</p>	<p>63%</p>	<p>18,33%</p>	<p>9%</p>	<p>40%</p>
<p>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</p>	<p>Jumlah aplikasi sistem pelaporan pengelolaan lingkungan hidup secara online yang tersedia</p>	<p>1</p>	<p>Aplikasi</p>		<p>1 Aplikasi</p>	<p>1 Aplikasi</p>	<p>100%</p>	<p>(1) 60 usaha dan kegiatan (2) 50 usaha</p>	<p>55 kegiatan dan usaha</p>	<p>45%</p>

RENJA 2024

	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan di wilayah kabupaten Mojokerto yang memiliki izin dokumen lingkungan yang terawasi secara langsung 150 usaha dan secara tidak langsung 100 usaha	150	usaha/kegiatan		150 usaha/kegiatan	85 usaha/kegiatan	57%			
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang terlaksana	90%			90%	90%	100%	13,46%		
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang	90%			90%	90%	100%	100%		

Lingkunga Hidup untuk Lembaga Kemasyara katan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	terlaksana									
Peningkata n Kapasitas dan Kompetens i Sumber Daya Manusia Bidang Lingkunga n Hidup untuk Lembaga Kemasyara katan	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan sampah dari perwakilan kader lingkungan	6500%	Peserta		65 Peserta	30 Peserta	46%	30 Peserta	10 Peserta	30%

RENJA 2024

	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah usulan desa/kelurahan yang dibina dan diusulkan berseri, Jumlah calon sekolah adiwiyata kabupaten, provinsi, nasional, mandiri yang dibina dan diusulkan	9 sekolah 9 desa			9 sekolah 9 desa	3 Desa berseri Tingkat Provinsi untuk kategori Pratama (Trawas, Jetis, dan Mojokumpul) 3 sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten, 4 sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi dan 1 sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional	33 % , 44 %	6 Desa/Kelurahan 12 sekolah	2 desa/ kelurahan, 6 sekolah	45%
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase jenis penghargaan yang diadakan	90%	Bulan		90%	100%	111%	24%		

RENJA 2024

	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kabupaten/ Kota	Presentase pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten yang terlaksana	90%			0.9	1	111%	100%		
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penilaian dan pemberian penghargaan "Peka Kelola" kepada usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria ketaatan, Jumlah SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang mengikuti lomba sekolah hijau	30 usaha atau kegiatan 8 sekolah			30 usaha atau kegiatan 8 sekolah	30 usaha/kegiatan untuk peka kelola dan 34 sekolah untuk sekolah hijau	100%,4.25 %			
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan tentang Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup yang Ditindak Lanjuti	1	Kali		1	1	100%			

RENJA 2024

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten /Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	1			1	1	100%			
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten /Kota	Jumlah pengaduan pencemaran lingkungan hidup terkait ijin yang ditindak lanjuti	20	kali		20 kali	9 Kali	45%	6 Pengaduan, 1 kecamatan	1 pengaduan	15%
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola menjadi hasil guna	33%			33%	30%	91%	99%		
Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang masuk ke TPA	85%			85%	80%	94%	26%		
Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah	Jumlah penghargaan kualitas lingkungan perkotaan (Adipura) yang	1	Penghargaan		1 penghargaan	1 penghargaan ADIPURA	100%	1 laporan	-	-

	Pengelolaan Sampah Kabupaten /Kota	diperoleh kategori kota kecil									
	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah armada pelayanan kebersihan dan pertamanan yang beroperasi, Jumlah kendaraan kebersihan dan pertamanan yang terpelihara secara rutin dan berkala	45, 45	unit		45 unit, 45 unit	45 unit, 45 unit	100%	143 orang/bulan 80 pcs peralatan	143 orang/bulan x 6 bulan 40 pcs peralatan	50%
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten /Kota	Jumlah berat sampah yang masuk ke TPA, Jumlah sampah liar dan pohon tumbang yang tertangani dengan cepat, Jumlah container kebersihan dan pertamanan yang, Jumlah ruas jalan kota dalam keadaan bersih oleh tenaga	11000 ton per tahun 35 kali 25 unit 18 ruas jalan			11000 ton per tahun 35 kali 25 unit 18 ruas jalan	11000 ton per tahun 35 kali 25 unit 18 ruas jalan	100%	2 TPA, 80 MoU/bulan	2 TPA 80 MoU/bulan x 6 bulan	50%

		kebersihan pasukan kuningterpelihara dengan baik									
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kegiatan peringatan hari peduli sampah nasional (HPSN), Jumlah bank sampah yang mengikuti lomba, Jumlah kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah yang terlaksana	1 kegiatan, 18 bank sampah, 1 kegiatan			1 kegiatan, 18 bank sampah, 1 kegiatan	1 kegiatan, 18 bank sampah, 1 kegiatan	100%	1 kali, 20 orang	10 orang	48%
	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah target PAD Retribusi pelayanan sampah(BOP Penertiban Retribusi sampah)	Rp 83,460,000			Rp 83,460,000	Rp. 1.106.250.000	1.325%	Rp. 890.610.000	Rp. 487.000.000	55%

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan kendaraan operasional retribusi (roda dua)									
	Jumlah pengadaan bak sampah pertamanan dan kebersihan	118	unit		118 unit	30 unit	25%			
	Jumlah pengadaan container persampahan	26	unit		26 unit	26 unit	100%			
	Jumlah pengadaan mobil armroll kebersihan dan pertamanan	1	unit		1 unit	1 unit	100%			
	Jumlah pengadaan penerangan	25	penerangan jalan		25 penerangan jalan	38 penerangan jalan	152%			
	Jumlah RTH hibah yang dibangun	1	lokasi		1 lokasi	1 lokasi	100%			

	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang tercapai	50%			50%	49.00%	98%			
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di Kabupaten Mojokerto yang tercapai	50%			50%	49%	98%			
	Rehabilitasi TPA/TPST/SATPS-3R/TPS	Persentase TPA yang terehabilitasi	80%			80%	84,4 %	106%			



n

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terlihat dalam tabel T-C.30 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan dukungan bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaa administrasi dibidang lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di dinas Lingkungan Hidup yaitu :

1. Penyelenggaraan urusan umum, keuangan, dan penyusunan rencana kegiatan;
2. Melaksanakan inventarisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan;
3. Melaksanakan pengelolaan sampah, pengurangan sampah serta pengelolaan limbah B3 (Bahan berbahaya dan beracun) dan pertamanan
4. Melaksanakan pemantauan lingkungan, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.

5. Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup, penyidikan dan pemeriksaan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup
6. Melaksanakan pengujian laboratorium lingkungan

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Mojokerto

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,88	64,20	64,53	64,86	69,75	69,92	64,53	64,86	
1.1	Indeks Kualitas Air (IKA)		Indeks Kualitas Air (IKA)	52,3	52,5	52,7	52,9	52,3	61,33	52,7	52,9	
1.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)		Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,5	83	83,5	84	82,5	89,37	83,5	84	
1.3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	49,31	49,54	49,77	50	49,31	48,71	49,77	50	

**RENJA 2024**

2	Persentase Penanganan Ruang Terbuka Hijau		-	-	16,40%	18,39%	20,54%	-	-	18,39%	20,54%	Indikator ini mulai tahun 2022
2.1	Persentase peningkatan Penanganan Ruang Terbuka Hijau		-	-	16,40%	18,39%	20,54%	-	-	18,39%	20,54%	Indikator ini mulai tahun 2022

Berdasarkan hasil analisa Tabel T-C.30 diatas menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) telah mencapai target dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2022 belum mencapai target yang sudah ditetapkan, Indikator untuk menentukan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam, yaitu (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS,pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO3,dan Fecal Coli, (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2 dan (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan dan kawasan lindung. Pada Tabel TC-30 diatas menunjukkan bahwa capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) telah mencapai target dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2022 belum mencapai target yang sudah ditetapkan, karena tidak adanya penambahan luas Ruang Terbuka Hijau di Kab. Mojokerto. Oleh karena itu, untuk masa mendatang, perlu dilakukan perbaikan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, agar tercapai peningkatan nilai IKLH dengan ketiga komponennya yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Indikator sasaran kedua adalah Persentase peningkatan Penanganan Ruang Terbuka Hijau, indikator sasaran kedua tercapai sesuai target karena semua RTH dan Taman yang pengelolaannya menjadi kewenangan

Dinas Lingkungan Hidup semua telah tertangani dengan merawat tanaman, pohon dan kebersihan setiap hari.

Tabel T.C-30 diatas menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Air mengalami peningkatan, Indeks Kualitas Udara mengalami penurunan dan Indeks Kualitas Lahan tidak mengalami perubahan. Indeks Kualitas Air mengalami peningkatan nilai antara tahun 2021 dan tahun 2022, namun terdapat perbedaan dalam perhitungan data. Pada Tahun 2021 pemantauan dilakukan pada 4 titik sungai dengan 44 parameter (pH, BOD, COD, TSS, DO, DO-MAX, NO₃-N, Total Fosfat, Fecal Coliform, Kecerahan, Klorofil, Total Coliform, Temperatur Air, Temperatur Udara, Minyak Lemak, Detergen Total, Fenol, TDS, Sulfat, Klorida, Nitrit, Amoniak, Total Nitrogen, Florida, Belerang sebagai H₂S, Sianida, Klorin Bebas, Warna, Sampah, Ba, B, Hg, As, Se, Fe, Cd, Co, Mn, Ni, Zn, Cu, Pb, Cr-6, Aldrin/Dieldrin, BHC, Chlordane, DDT, Endrin, Heptachlor, Lindane, Methoxychlor, Toxapan, Radioaktivitas Gross A, Radioaktivitas Gross B). Kemudian pada tahun 2022 pemantauan dilakukan pada 12 Titik Sungai pada hulu dan hilir sebanyak 2 kali dalam setahun dengan 12 parameter (pH, TSS, TDS, BODs, COD, DO, Tembaga (Cu), Cobat (Co), H₂S, Nitrat (NO₃-N)*), Fecal Coli, Total Fosfat). Pada Tahun 2022 uji kualitas air badan air di Kabupaten Mojokerto dilakukan pada 12 Titik Sungai hulu dan hilir dengan 2 kali pengambilan sample dalam satu tahun. Tabel uji kualitas air badan air disajikan dalam Tabel 3.3 dibawah ini dan hasil dari uji kualitas air ini

dikirimkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKL) untuk mendapatkan hasil Indeks Kualitas Air (IKA).

Tabel 3.3

Hasil uji air badan air di sungai Kabupaten Mojokerto pada 12 titik.

Tanggal Sampling	Lokasi Air Sungai		Hasil Uji Kualitas													
			pH	Suhu	TSS	TDS	BODs	COD	DO	Tembaga (Cu)	Cobat (Co)	H2S	Nitrat (NO ₃ -N)*	Fecal Coli	Total Coli	Total Fosfat sebagai P
Tahun 2022																
11 April 2022	Hulu Sungai Pikatan	S 07°38'45"	E 112°30'47"	7.96		8.40	68	1.86	4.67	6.71	<0,01 19	<0,03 44	0.3 84	0.54 8	230	0.035
11 April 2022	Hilir Sungai Pikatan	S 07°36'47"	E 112°29'49"	8.14		54.90	108.0	3.09	7.63	5.62	<0,01 19	<0,03 44	1.2 3	0.47 7	430	0.0786
11 April 2022	Hulu Sungai Cumpleng	S 07°40'17"	E 112°32'46"	8.3		7.80	155.0	2.24	5.48	6.1	<0,01 19	<0,03 44	0.5 41	0.53 5	170	0.051
11 April 2022	Hilir Sungai Cumpleng	S 07°32'31"	E 112°33'5"	8.22		37.6	116.0	2.72	6.57	5.92	<0,01 19	<0,03 44	0.5 64	0.50 4	240	0.103
12 April 2022	Hulu Sungai	S 07°28'2	E 112°27'56	8.04		25.1	248.0	3.51	8.72	5.32	<0,01 19	<0,03 44	<0, 10	7.55	580	0.38

RENJA 2024

	Sadar		3"	"										7				
11 April 2022	Hilir Sungai Sadar		S 07°31'27"	E 112°36'40"	8.33		34.4	258.0	3.76	8.94	5.24	<0,0119	<0,0344	0.586	0.891	470		0.185
11 April 2022	Hulu Sungai Kromong		S 07°40'19"	E 112°32'7"	7.84		9.70	168.0	1.96	4.9	6.39	<0,0119	<0,0344	<0,107	0.450	210		0.0701
11 April 2022	Hilir Sungai Kromong		S 07°37'52"	E 112°30'36"	7.78		18.6	101.0	3.39	8.39	5.34	<0,0119	<0,0344	0.700	0.454	400		0.0532
12 April 2022	Hulu Sungai Marmoyo		S 07°25'60"	E 112°23'54"	8.39		29.70	284.0	1.41	3.52	7.14	<0,0119	<0,0344	<0,107	0.482	130		0.124
12 April 2022	Hilir Sungai Marmoyo		S 07°24'40"	E 112°28'24"	8.54		37.70	304.0	1.43	3.6	6.93	<0,0119	<0,0344	0.451	0.514	480		0.143
12 April 2022	Hulu Sungai Kwangen		S 07°23'50"	E 112°28'52"	8.38		12.3	470.0	1.56	3.85	6.75	<0,0119	<0,0344	<0,107	0.642	170		0.0752
12 April 2022	Hilir Sungai Kwangen		S 07°24'23"	E 112°29'11"	8.54		46.8	507.0	1.78	4.34	6.67	<0,0119	<0,0344	0.181	0.682	230		0.196
12 April 2022	Hulu Sungai Kedungsoro		S 07°35'31"	E 112°23'53"	8.34		36.2	256.0	1.68	4.12	6.71	<0,0119	<0,0344	0.248	0.524	110		0.175
12 April 2022	Hilir Sungai Kedungsoro		S 07°25'05"	E 112°25'52"	8.42		54.0	259.0	2.10	5.15	6.19	<0,0119	<0,0344	0.113	0.522	270		0.213
18 April 2022	Hulu Sungai Brangkal		S 07°34'18"	E 112°25'34"	8.02		46.0	163.0	1.83	4.56	6.86	<0,0119	<0,0344	<0,107	0.486	280		0.133

RENJA 2024

18 April 2022	Hilir Sungai Brangkal	S 07°31'25"	E 112°24'54"	7.81	72.8	100.0	3.84	7.08	5.18	<0,01 19	<0,03 44	0.3 84	0.50 7	340	0.112
20 April 2022	Hulu Sungai Sumber Kembar	S 07°30'47"	E 112°33'14"	7.51	67.5	161.0	5.04	12.5	5.66	<0,01 19	<0,03 44	<0, 10 7	0.59 9	340	0.165
20 April 2022	Hilir Sungai Sumber Kembar	S 07°30'14"	E 112°33'25"	7.74	61.4	182.0	5.41	13.4	5.28	<0,01 19	<0,03 44	<0, 10 7	0.61 8	840	0.236
21 April 2022	Hulu Sungai Jurangceto	S 07°37'55"	E 112°24'36"	7.38	5.80	61.9	2.47	5.86	6.53	<0,01 19	<0,03 44	0.4 74	0.47	310	0.0236
21 April 2022	Hilir Sungai Jurangceto	S 07°36'10"	E 112°25'2"	7.48	14.6	66.5	2.72	6.79	6.15	<0,01 19	<0,03 44	0.6 77	0.56 2	330	0.0517
22 April 2022	Hulu Sungai Sumberwaru	S 07°32'37"	E 112°37'17"	7.83	12.0	323.0	2.62	6.46	6.31	<0,01 19	<0,03 44	<0, 10 7	4.41	480	0.318
22 April 2022	Hilir Sungai Sumberwaru	S 07°32'41"	E 112°38'42"	7.88	17.6	208.0	2.86	7.17	6.17	<0,01 19	<0,03 44	<0, 10 7	3.39	630	0.283
22 April 2022	Hulu Sungai Janjing	S 07°36'55"	E 112°35'4"	7.68	16.2	108.0	2.25	5.53	6.72	<0,01 19	<0,03 44	0.1 13	0.47 1	460. 000	0.0507
22 April 2022	Hilir Sungai Janjing	S 07°34'5"	E 112°34'28"	7.70	19.3	114.0	2.46	6.03	6.41	<0,01 19	<0,03 44	0.2 66	0.49 1	490	0.0588
21 November 2022	Hulu Sungai Pikatan	S 07°38'45"	E 112°30'47"	8.31	19.1	152.0	8.67	28.9	7.48	<0,01 19	<0,03 44	0.5 41	0.47	560	0.0306

RENJA 2024

21 November 2022	Hilir Sungai Pikatan	S 07°36'4 7"	E 112°29'49 "	8.40	28.5	155.0	3.52	11.7	7.22	<0,01 19	<0,03 44	0.3 39	0.49 0	540	0.0592
21 November 2022	Hulu Sungai Cumpleng	S 07°40'1 7"	E 112°32'46 "	8.67	20.8	271.0	6.79	22.5	6.71	<0,01 19	<0,03 44	<0, 10 7	0.48 1	940	0.0591
21 November 2022	Hilir Sungai Cumpleng	S 07°32'3 1"	E 112°33'5"	8.16	110.0	264.0	4.73	15.7	6.45	<0,01 19	<0,03 44	<0, 10 7	0.65 5	700	0.148
22 November 2022	Hulu Sungai Sadar	S 07°28'2 3"	E 112°27'56	8.07	54.5	273.0	5.59	18.5	5.32	<0,01 19	<0,03 44	<0, 10 7	1.03	700	0.175
22 November 2022	Hilir Sungai Sadar	S 07°31'2 7"	E "112°36'4 0"	7.76	48.5	358.0	3.53	17.4	6.33	<0,01 19	<0,03 44	<0, 10 7	0.93 9	700	0.126
21 November 2022	Hulu Sungai Kromong	S 07°40'1 9"	E 112°32'7"	8.61	14.9	313.0	4.36	14.5	6.99	<0,01 19	<0,03 44	<0, 10 7	0.46 0	700	0.0737
21 November 2022	Hilir Sungai Kromong	S 07°37'5 2"	E 112°30'36 "	8.36	27.7	139.5	5.64	18.8	7.22	<0,01 19	<0,03 44	0.5 64	0.48 1	630	0.0519
22 November 2022	Hulu Sungai Marmoyo	S 07°25'6 0"	E 112°23'54 "	8.19	101.7	406.0	2.56	8.42	6.45	<0,01 19	<0,03 44	<0, 10 7	0.93 9	340	0.184
22 November 2022	Hilir Sungai Marmoyo	S 07°24'4 0"	E 112°28'24 "	8.04	102.5	339.0	3.35	11.2	6.83	<0,01 19	<0,03 44	<0, 10 7	0.73 5	230	0.177
22 November 2022	Hulu Sungai Kwangen	S 07°23'5 0"	E 112°28'52 "	8.13	21.8	600.0	3.53	11.7	5.74	<0,01 19	<0,03 44	<0, 10 7	1.07	310	0.0686
22 November 2022	Hilir Sungai Kwangen	S 07°24'2 3"	E 112°29'11 "	7.61	55.0	592.2	10.6	25.6	4.25	<0,01 19	<0,03 44	0.4 51	0.62 0	920	0.399

RENJA 2024

22 November 2022	Hulu Sungai Kedungsor o	S 07°35'3 1"	E 112°23'53 "	7.87	51.5	269.0	11.3	37.8	6.91	<0,01 19	<0,03 44	0.3 16	0.90 4	860	0.188
22 November 2022	Hilir Sungai Kedungsor o	S 07°25'0 5"	E 112°25'52 "	7.87	35.5	334.0	4.68	15.5	7.34	< 0,011 9	< 0,034 4	0.1 13	0.78 3	81	0.175
21 November 2022	Hulu Sungai Brangkal	S 07°34'1 8"	E 112°25'34 "	8.21	245.0	139.5	2.79	9.25	6.93	<0,01 19	<0,03 44	<0, 10 7	0.60 6	630	0.298
21 November 2022	Hilir Sungai Brangkal	S 07°31'2 5"	E 112°24'54 "	8.04	123.0	121.0	4.18	13.5	7.01	<0,01 19	<0,03 44	0.2 93	0.54 4	700	0.174
22 November 2022	Hulu Sungai Sumber Kembar	S 07°30'4 7"	E 112°33'14 "	7.76	52	263.0	1.9	11.4	6.7	<0,01 19	<0,03 44	<0, 10 7	0.61	440	0.128
22 November 2022	Hilir Sungai Sumber Kembar	S 07°30'1 4"	E 112°33'25 "	7.66	36.9	299.0	6.3	21.2	6.2	<0,01 19	0.0	0.4 51	0.84 2	860	0.199
21 November 2022	Hulu Sungai Jurangceto t	S 07°37'5 5"	E 112°24'36 "	8.32	7.20	104.5	0.828	2.76	7.14	<0,01 19	<0,03 44	<0, 10 7	0.44 6	430	<0,012 1
21 November 2022	Hilir Sungai Jurangceto t	S 07°36'1 0"	E 112°25'2" "	8.33	22.7	99.0	3.39	11.0	7.18	<0,01 19	<0,03 44	<0, 10 7	0.47 0	420	0.156
22 November 2022	Hulu Sungai Sumberwar u	S 07°32'3 7"	E 112°37'17 "	7.65	13.9	380.5	1.68	5.62	6.37	<0,01 19	<0,03 44	<0, 10 7	1.41	300	0.388
22 November	Hilir Sungai Sumberwar	S 07°32'4	E 112°38'42	7.86	32.0	334.5	1.88	6.27	6.21	<0,01 19	<0,03 44	<0, 10	1.18	480	0.297

2022	u	1"	"											7				
21 November 2022	Hulu Sungai Janjing	S 07°36'5 5"	E 112°35'4"	8.46	14.8	196.8	4.18	13.9	6.79	<0,01 19	<0,03 44	<0, 10 7	0.47 6	460				0.0447
21 November 2022	Hilir Sungai Janjing	S 07°34'5"	E 112°34'28 "	8.57	18.4	157.0	0.970	3.30	6.75	<0,01 19	<0,03 44	0.1 81	0.49 7	330				0.0315

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2021 sebesar 90,18 mengalami penurunan sebesar 0,89% menjadi 89,37. Terdapat perubahan titik pantau yang dilakukan pada Tahun 2021 dan 2022. Tahun 2021 dilakukan pemantauan di 4 titik dengan 2 kali pengulangan, sedangkan untuk tahun 2022 dilakukan di 8 titik dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4

Hasil uji udara menggunakan metode passive sampler dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 8 titik

NO	Provinsi	Kabupaten	Lokasi	Titik Koordinat	Titik Koordinat	SO2	NO2
						µg/Nm3	µg/m3
1	JAWA TIMUR (3500)	MOJOKERTO (3516)	Kantor DLH Jl. Pemuda No 55 B	S : 07° 30' 30,7"	E : 112° 25' 62,4"	5.24	13.115
			Taman Lalu Lintas Jl. Hayam Wuruk Mojosari	S : 07° 31' 10,2"	E : 112° 25' 2,6"	4.125	6.645
			Perumahan Wisma Pungging Permai Kec. Pungging	S : 07° 33' 21,1"	E : 112° 36' 52,4"	7.47	8.745
			Ngoro Industrial Park (NIP)	S : 07° 31' 5"	E : 112° 33' 27,2"	7.53	9.38
			Tugu UKS, Jl. Jayanegara Kab. Mojokerto	-7,4893 S	112,4400 E	13	31
			Perum Japan Asri, Sooko, Mojokerto	-7,5000 S	112,4257 E	9	16

			Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto	-7,4890 S	112,4268 E	10	22
			Halaman PT. Sunrise Steel	-7,5155 S	112,4279 E	11	30

Perbedaan jumlah sampel akan mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan. Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2021 sebesar 48,71 tidak mengalami perubahan pada tahun 2022 yaitu sebesar 48,71. Belum adanya peningkatan Indeks Kualitas Lahan (IKL) disebabkan karena pengelolaan inventarisasi data yang kurang baik sehingga terdapat beberapa data yang belum terinventarisasi dan menyebabkan Indeks Kualitas Lahan (IKL) mengalami penurunan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu – isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sekrepsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap sasaran strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Capaian program nasional seperti SPM dan SDG'S serta Penentuan isu – isu strategis yang masing – masing dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pencemaran Sungai.

Permasalahan utama didalam upaya pengelolaan kualitas air adalah Pencemaran air sungai karena nilai BOD dan COD ada yang melebihi standar baku mutu, hal ini terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Pertambahan penduduk dan meningkatnya aktifitas pembangunan yang menghasilkan beban pencemaran ke sungai :
 - Limbah domestik (sampah, tinja/ black water, dan air buangan rumah tangga/ grey water)
 - Limbah pertanian dan perkebunan (pupuk dan pestisida parameter N dan P, serta sedimen akibat pembukaan lahan dan erosi lahan parameter TSS).
 - Limbah industri (BOD dan COD).
- b. Hasil inventarisasi kegiatan di sepanjang sungai, masih banyak kegiatan yang membuang limbah padat dan limbah cair berasal dari domestik, pertanian dan perkebunan, peternakan, dan industri.
- c. Tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan (Tabel-34) mempengaruhi pola pikir masyarakat dan pengetahuan terhadap lingkungan.
- d. Masih terdapat penduduk yang belum memiliki tempat buang air besar sendiri dan melakukan aktifitas Buang Air Besar (BAB) di sungai.

2. Pencemaran Udara.

Permasalahan utama didalam upaya pengelolaan kualitas udara adalah pencemaran udara, hal ini dikarenakan meningkatnya pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara telah mengalami perubahan. Udara yang dulunya segar, kini kering dan kotor. Perubahan lingkungan

udara pada umumnya disebabkan pencemaran udara, hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu :

- a. Meningkatnya jumlah kendaraan sebagai bagian dari kebutuhan manusia akan alat transportasi semakin meningkat dan akan berdampak pada peningkatan emisi udara sumber bergerak.
- b. Infrastruktur jalan yang berubah
- c. Meningkatnya kendaraan akan meningkatkan penjualan BBM sehingga emisi GRK juga cenderung meningkat.
- d. Belum optimalnya uji emisi gas buang kendaraan bermotor.
- e. Penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar menimbulkan asap dan debu berlebihan.
- f. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) cenderung tetap, padahal memiliki fungsi utama untuk menyerap polutan udara kendaraan bermotor di sekitar kawasan kota.

3. Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

Beberapa faktor permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan limbah B3 yaitu :

- Aktivitas kegiatan terminal, industri, Rumah Sakit, Hotel, dan Pariwisata menghasilkan limbah padat, cair, dan B3.
- Masih adanya industri dan Rumah Sakit/fasilitas kesehatan dengan kondisi IPAL masih belum dapat bekerja optimal.

- Masih sedikit kegiatan industri dan Rumah Sakit/fasilitas kesehatan yang mempunyai izin pembuangan limbah cair (IPLC) dan izin penyimpanan limbah B3.
- Kegiatan industri dan Rumah Sakit/fasilitas kesehatan yang sudah mempunyai IPLC limbah B3 tetapi masih kesulitan untuk pengelolaannya.

4. Persampahan

Permasalahan utama yang menjadi penyebab meningkatnya volume sampah yang kemudian dapat menimbulkan berbagai masalah bagi kesehatan manusia, banjir, menimbulkan sarang penyakit, pencemaran air bersih, pencemaran tanah, tersumbatnya saluran air, lingkungan akan menjadi kumuh serta bau yang tidak sedap dan merusak keindahan visual kota/ kabupaten itu sendiri. Beberapa faktor permasalahan yang menjadi penyebab berbagai masalah yang diakibatkan volume sampah yang meningkat yaitu :

- Meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas penduduk menyebabkan meningkatnya jumlah timbulan sampah.
- Masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai dan pinggir jalan.
- Program pengurangan sampah dengan metode 3R (reduce, reuse, dan recycle) masih belum optimal.
- Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R.
- Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah 3R.

- Kurangnya armada pengangkut sampah dan sarana pengolahan sampah di TPA.

5. Pemanfaatan Lahan (Berkurangnya penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau RTH)

Berkurangnya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) diakibatkan adanya alih fungsi lahan. Laju alih fungsi lahan dari tanah pertanian atau lahan terbuka menjadi kawasan pemukiman, kawasan komersial, dan sejenisnya yang cukup pesat ini menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian/ lahan terbuka di Kabupaten Mojokerto.

6. Permasalahan Sosial Kemasyarakatan

Pendekatan komponen utama PLH yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial perlu diterapkan mulai dari tahap perencanaan, hingga operasional dan evaluasinya. Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan lepas dari aspek sosiasal, ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan karena menyangkut kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Aspek kemasyarakatan dapat dilihat dari memburuknya kualitas fisik/ infrastruktur perkotaan, serta murunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan. Hal ini disebabkan keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang lebih banyak dipicu oleh faktor daya tarik ekonomi dalam urbanisasi.

Masalah kemasyarakatan ini dapat didekati dengan perubahan paradigma yang berpihak pada pengelolaan lingkungan hidup, yang kemudian diikuti dengan sosialisasi tentang hak dan kewajiban mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Mojokerto, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah tahap pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Mojokerto. RPJMD Kabupaten Mojokerto merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang perlu ditindak lanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya. Untuk itulah Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun draft RENSTRA Tahun 2021-2026 dan menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Mojokerto Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Perbandingan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 seperti yang tertera pada tabel T-C.31 sebagai berikut.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kegiatan/ Program	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Mojo kerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.34 (A)	17.940.820.851	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Mojo kerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.34 (A)	13.611.086.000	

2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Mojo kerto	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	58,46%	275.000.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Mojo kerto	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	58,46%	235,000,000	
---	---	------------------------	---	---------------	--------------------	---	------------------------	---	---------------	--------------------	--

	<p>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</p>	<p>Kab. Mojo kerto</p>				<p>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</p>	<p>Kab. Mojo kerto</p>			<p>1,086,497,200</p>	
			<p>1. Persentase hasil uji titik pantau kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu</p>	<p>53.19%</p>	<p>1.186.616.000</p>			<p>1. Persentase hasil uji titik pantau kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu</p>	<p>53.19%</p>	<p>1.219.650.000</p>	

			2. Prosentase peningkatan luas lahan yang terpulihkan	9.60%	250.000.000			2. Prosentase peningkatan luas lahan yang terpulihkan	9.60%	140.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Mojokerto	Persentase luas area keanekaragaman hayati di Kabupaten Mojokerto yang terkelola	78%	3.041.426.850	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Mojokerto	Persentase luas area keanekaragaman hayati di Kabupaten Mojokerto yang terkelola	69.00%	3.251.025.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN	Kab. Mojokerto	Persentase Penghasil B3 dan Limbah Bahan Berbahaya,	100%	105,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	Kab. Mojokerto	Persentase Penghasil B3 dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Terpantau	100%	45,000,000	

	<p>BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA A DAN BERACUN (LIMBAH B3)</p>		<p>Beracun (B3) yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Terpantau Pengelolaannya</p>			<p>(B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</p>		<p>Pengelolaannya</p>			
	<p>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN</p>	<p>Kab. Mojo kerto</p>	<p>Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang</p>	<p>57.86%</p>	<p>244.000.000</p>	<p>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN</p>	<p>Kab. Mojo kerto</p>	<p>Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto</p>	<p>57.86%</p>	<p>244,000,000</p>	

	AAN LINGKUNGA N HIDUP (PPLH)		diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto			LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
--	---	--	---	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

PROGRAM PENINGKATAN AN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN AN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Mojo kerto	Persentase peningkatan lembaga masyarakat yang memiliki pengetahuan di bidang lingkungan hidup melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	16,43%	275,000,000	PROGRAM PENINGKATAN AN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN AN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Mojo kerto	Persentase peningkatan lembaga masyarakat yang memiliki pengetahuan di bidang lingkungan hidup melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	14.94%	255,000,000	
PROGRAM PENGHARGAAN AN LINGKUNGAN	Kab. Mojo kerto	Persentase lembaga masyarakat yang	49.00%	50,000,000	PROGRAM PENGHARGAAN AN LINGKUNGAN	Kab. Mojo kerto	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan di bidang lingkungan hidup	49.00%	50,000,000	

	N HIDUP UNTUK MASYARAKAT		mendapat penghargaan di bidang lingkungan hidup			HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Mojo kerto	Pesentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya	75%	133.958.501	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Mojo kerto	Pesentase Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten yang Tertangani	75%	45,000,000	

			di daerah kabupaten yang tertangani								
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Mojokerto	Persentase sampah yang terkelola di Kabupaten Mojokerto	99.00%	8.140.470.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Mojokerto	Persentase sampah yang terkelola di Kabupaten Mojokerto	99.00%	11.353.600.000	
					31.742.291.932					30.449.361.000	

Dari Rancangan yang telah disusun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang akan diimplementasikan ke dalam penetapan kinerja tahun berikutnya. Dalam Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam penyusunannya perlu memperhatikan seluruh

aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mengacu pada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mojokerto, draft Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 serta usulan dari masyarakat. Sebagai dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, maka kebijakan yang diambil dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto selalu diselaraskan dengan kebijakan umum Kepala daerah dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai pembantu Presiden dalam mencapai visi dan misi nasional. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. Usulan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam bentuk kamus usulan untuk mengakomodir usulan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel **T.C-32** dibawah ini :

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Mojokerto

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besarnya/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	7
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH Kab. Mojokerto	Persentase sampah yang terkelola di Kabupaten Mojokerto	99.00%	
	Pengelolaan Sampah	DLH Kab. Mojokerto	Persentase Pengurangan sampah melalui 3R di Kabupaten Mojokerto	26.00%	
			Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Mojokerto	73.00%	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	DLH Kab. Mojokerto			
	Rincian :				
	Pembinaan Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga	DLH Kab. Mojokerto	Jumlah peserta pembinaan pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga (Intensif 5 Desa yang usul melalui Musrenbang dan 8 desa)	200 peserta	Rincian sub kegiatan yang sesuai dengan usulan musrenbang
	Usulan dari Musrenbang :				

	Sosialisasi pengelelolaan sampah	Desa Balongmojo	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan sampah	25 peserta	Usulan tersebut disetujui untuk 25 peserta karena sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah dan termasuk program prioritas Bupati
	Sosialisasi pengelelolaan sampah	Desa Mbrayung, Kec. Puri	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan sampah	25 peserta	Usulan tersebut dikembalikan karena sudah dilaksanakan sosialisasi pengelolaan sampah di Desa Brayung pada tahun 2022
	Pembinaan Pengelolaan Sampah TPS3R	Desa Trawas	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan sampah	25 Peserta	Usulan tersebut disetujui karena sesuai dengan output dari Sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	Sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilahan dan pengolahan sampah	Desa Kebonagung	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan sampah	25 Peserta	Usulan tersebut disetujui karena sesuai dengan output dari Sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	<p>Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p> <p>Rincian :</p> <p>Pengadaan Buldozer dan Container Sampah</p> <p>Usulan dari Musrenbang :</p> <p>Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga dan</p>	DLH Kab. Mojokerto			
		RT. 08 RW. 02 Desa Gempolkerep	Jumlah Pengangkut sampah = 2 unit Tong sampah Besar = 72 unit	74 Unit	Dapat mengajukan MOU pelayanan pengangkutan



RENJA 2024

	industri serta peningkatan tata kelola TPA				sampah dengan Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3 DLH Kab. Mojokerto, jika disetujui akan difasilitasi kontainer untuk penampungan sampah sebelum diangkut di lokasi yang telah disediakan
--	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yaitu : **Indonesia Asri dan Lestari** yang diupayakan dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar Pembangunan.
- b. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan

kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan, maka terdapat sebanyak 4 Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan sebanyak 1 Prioritas Nasional yang terkait dengan lingkungan hidup yang sesuai kondisi di wilayah Kabupaten Mojokerto yaitu : **Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.**

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas : (1) indeks kualitas udara (IKU) dari 84,1 poin menjadi 84,5 poin (2024); (2) indeks kualitas air (IKA) dari 55,1 poin menjadi 55,5 poin (2024); (3) indeks kualitas air laut (IKAL) dari 58,5 menjadi 60,5 poin (2024); (4) indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dari 61,6 poin menjadi 65,5 poin (2024)
- 2) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan dari 1.048 lokasi menjadi 1.141 lokasi (2024); (2)

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan dari 1.705 perusahaan menjadi 3.750 perusahaan (2024); (3) Luas area dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang dipertahankan - 125 - secara nasional dari 52 juta hektar menjadi 70 juta hektar (2024); (4) Luas kawasan konservasi yang dikelola dari 27 juta hektar, kemudian tetap menjadi 27 juta hektar (2024); (5) luas Kawasan konservasi perairan dari 22,68 juta hektar menjadi 26,9 juta hektar (2024); (6) Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun dari semula seluas 942.485 hektar areal terbakar, kemudian diupayakan turun menjadi 2% dari data tersebut.

- 3) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah sampah yang dikelola secara nasional dari 67,45 juta ton menjadi 339,4 juta ton (2024); (2) persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut menjadi 60 persen dari baseline tersebut (2024); (3) jumlah limbah B3 yang dikelola dari 367,3 juta ton menjadi 539,8 juta ton (2024)
- 4) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan dari 475.676 ton menjadi 1.200.000 ton (2024); (2) jumlah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan kondisinya dari 17 lokasi menjadi 26 lokasi (2024); (3) jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan

populasinya dari 25 jenis, kemudian tetap dijaga menjadi 25 jenis (2024).

- 5) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dari 30 % menjadi 70 % - 126 - (2024); (2) jumlah kasus pidana dan perdata LHK yang ditangani dari 193 kasus menjadi 540 kasus (2024); (3) jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman dari 4.384.918 hektar menjadi 10.000.000 hektar (2024); (4) jumlah daerah yang memiliki perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan sebanyak 34 provinsi (2024).

- c. Sasaran strategis yang hendak dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkaitan dengan Arah kebijakan dan strategi dalam Prioritas Nasional (PN) 6 terdiri dari : 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan 3) pembangunan rendah karbon. Rincian masing-masing dijelaskan di bawah ini. Sasaran strategis yang hendak dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah :

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi:

1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) pemantauan kualitas udara, air dan air laut; (2) pemantaun kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan; (3) pencegahan kebakaran hutan dan lahan; (4) pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dan pesisir; (5) peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup; (6) pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah, baik di daratan maupun perairan; (7) penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem.
2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan: (1) penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan; (2) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah plastik; (3) penghapusan dan penggantian merkuri, terutama di lokasi penambang emas skala kecil (PESK); (4) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis secara terpadu.
3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) restorasi dan pemulihan lahan gambut dan areal bekas terbakar; (2) pemulihan lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3; (3) pemulihan kerusakan ekosistem dan lingkungan pesisir dan laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu

karang, dan padang lamun; (4) pemulihan habitat spesies terancam punah
(5) peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar (TSL) terancam punah.

4. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah; (2) penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (3) penguatan mekanisme pidana, perdata dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

➤ Tujuan

Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program - program pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Renstra DLH Kabupaten Mojokerto 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026. Arah kebijakan umum

pembangunan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam upaya merespon permasalahan atau isu yang berkembang mengacu sepenuhnya pada tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut:

“Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas” dan

“Meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau yang tertangani”

Dalam menentukan tujuan dan indikator tujuan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mengacu pada sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten dengan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Dibawah ini disajikan indikator sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto adalah IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) dan Persentase Penanganan Ruang Terbuka Hijau.

➤ **Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran dan indikator sasaran tahun 2023 yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah

Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan, merupakan kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2023 yaitu:

“Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas” dan “Perluasan Ruang Terbuka Hijau”

Dalam menentukan sasaran dan indikator sasaran, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tetap mengacu pada sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten dengan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Dibawah ini disajikan indikator sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan
4. Persentase peningkatan Penanganan Ruang Terbuka Hijau

3.3 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang direncanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah 1 program

penunjang urusan pemerintah daerah dengan 7 kegiatan 20 sub kegiatan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar terdiri dari 9 program pembangunan lingkungan hidup dengan 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 dan sejalan dengan Program Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yaitu:

SEMUA BIDANG URUSAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

1.1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

1.1.1 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

1.1.2 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

1.2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

1.2.1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang

1.2.2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

1.2.3 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

- 2.1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - 2.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - 2.1.3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 2.2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 2.2.1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
 - 2.2.2 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 2.2.3 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 2.3 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 2.3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
 - 2.3.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
 - 2.3.3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi
 - 2.3.4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
 - 2.3.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi

3. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

3.1 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

3.1.1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati

3.1.2 Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

3.1.3 Pengelolaan Kebun Raya

3.1.4 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

3.1.5 Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya

3.1.6 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati

3.1.7 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati

4. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

4.1 Penyimpanan Sementara Limbah B3

4.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

4.1.2 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

4.2 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.2.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3

Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

4.2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan

Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

5.1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

5.1.2 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

5.1.3 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

6. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

6.1 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

6.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

6.2 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

6.2.1 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH

7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

7.1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7.1.1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

7.1.2 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

7.1.3 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan
Hidup

8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT

8.1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

8.1.1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia
Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

9. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

9.1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

9.2 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH
Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi
Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan
Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

10. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

10.1 Pengelolaan Sampah

10.1.1 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan
Sampah Kabupaten/Kota

10.1.2 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan,
Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

- 10.1.3 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- 10.1.4 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- 10.1.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
- 10.1.6 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
- 10.1.7 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Rincian program dan kegiatan baik penunjang urusan pemerintah maupun urusan Lingkungan Hidup (urusan wajib bukan pelayanan dasar) Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran tabel **T.C-33** berikut:

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Mojokerto

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATA TAN PENTI NG	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				30,449,361,000.00				34,008,374,165.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				30,449,361,000.00				34,008,374,165.00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				30,449,361,000.00				34,008,374,165.00
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	DLH KAB. MOJOKERTO	82,34 (A) nilai	13,611,086,000.00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		83,14 (A) nilai	19,411,976,640.00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja PD Bernilai Baik		97 %	25,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		97 %	62,084,725.00
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		2 Dokumen	12,500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	21,854,540.00
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		5 Laporan	12,500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Laporan	40,230,185.00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase realisasi anggaran perangkat daerah</i>		95 %	12,320,086,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		95 %	17,896,364,842.00
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		145 Orang/bulan	12,320,086,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		145 Orang/bulan	17,896,364,842.00
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</i>		75.50 Indeks	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		75.50 Indeks	185,000,000.00
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>		1 Paket	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	120,000,000.00
2.11.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								

RENJA 2024

		<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>		1 Dokumen	0.00			1 Dokumen	15,000,000.00
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>		3 Orang	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Orang	50,000,000.00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan</i>		98 %	285,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Paket	370,000,000.00
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		6 Paket	100,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Paket	130,000,000.00
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>		2 Paket	0.00			2 Paket	25,000,000.00
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>		15 Paket	15,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15 Paket	20,000,000.00
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								

RENJA 2024

		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>		7 Paket	15,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Paket	0	20,000,000.0
2.11.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material									
		<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>		4 Paket	40,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Paket	0	45,000,000.0
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>		12 Laporan	15,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan		20,000,000.00
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		12 Laporan	100,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan		110,000,000.00
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi</i>		98 %	80,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit		30,000,000.00
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>		2 Unit	0.00			2 Unit		30,000,000.00
2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

RENJA 2024

		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>		4 Unit	80,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Unit	0.00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan</i>		100 %	476,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 %	486,000,000.00
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>		12 Laporan	260,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	270,000,000.00
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		12 Laporan	216,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	216,000,000.00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik</i>		100 %	375,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 %	382,527,073.00
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>		60 Unit	250,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60 Unit	250,000,000.00
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

RENJA 2024

		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>		3 Unit	75,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	102,527,073.00
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>		30 Unit	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Unit	30,000,000.00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</i>		58.46 %	235,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		58.46 %	375,000,000.00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	<i>Persentase tersusunnya penetapan dan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>		69.89 %	195,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		69.89 %	335,000,000.00
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun</i>		4 Dokumen	140,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	265,000,000.00
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota								

RENJA 2024

		<i>Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota</i>		106 Dokumen	55,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		106 Dokumen	70,000,000.00
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	<i>Persentase pembinaan penyelenggaraan KLHS yang terlaksana</i>		33 %	40,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		33 %	40,000,000.00
2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup								
		<i>Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun</i>		1 Dokumen	40,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	40,000,000.00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu Persentase Peningkatan Luas Lahan yang Terpulihkan</i>		53,19 % 9,60 %	1,359,650,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		53,19 % 9,60 %	1,482,180,640.00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Persentase peningkatan jumlah titik pantau kualitas air dan udara</i>		74.18 %	1,094,650,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		74.18 %	1,038,680,640.00
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								
		<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>		6 Dokumen	120,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Dokumen	265,000,000.00
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim								

		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>		1 Dokumen	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	0.00
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan</i>		2 Dokumen	924,650,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	773,680,640.00
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Prosentase jumlah wilayah terfasilitasi penanggulangan kondisi pencemaran/kerusakan lingkungan</i>		11,11%	125,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11,11%	176,000,000.00
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat								
		<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan</i>		2 Laporan	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	76,000,000.00
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								
		<i>Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan</i>		55 Titik	75,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		55 Titik	100,000,000.00

RENJA 2024

2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Persentase peningkatan lahan kritis terpulihkan</i>		2.80%	140,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.80%	267,500,000.00
2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar</i>		1 Dokumen	40,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	35,000,000.00
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi</i>		1 Dokumen	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	110,000,000.00
2.11.03.2.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi</i>		1 Dokumen	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	122,500,000.00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	<i>Persentase Luas Area Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Mojokerto yang Terkelola</i>		78.00 %	3,251,025,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		78.00 %	3,254,326,730.00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	<i>Persentase luas ruang terbuka hijau disetiap kecamatan yang terkelola</i>		78 %	3,251,025,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	3,254,326,730.00
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati								

RENJA 2024

		<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun</i>		1 Dokumen	76,025,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	75,000,000.00
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan								
		<i>Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		0.0835 Ha	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0.0835 Ha	50,000,000.00
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
		<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		8.2 Ha	2,400,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8.2 Ha	2,581,346,751.00
2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati								
		<i>Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati</i>		80 Orang	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		80 Orang	50,000,000.00
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola</i>		1230 Unit	675,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1230 Unit	497,979,979.00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	<i>Persentase Penghasil B3 dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Terpantau Pengelolaannya</i>		100.00 %	45,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100.00 %	55,000,000.00

RENJA 2024

2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	<i>Persentase penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau penyimpanannya</i>		62.66 %	40,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		62.66 %	50,000,000.00
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3								
		<i>Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3</i>		10 Laporan	40,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Laporan	50,000,000.00
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau pengumpulan dan pengelolaan lebih lanjut</i>		37.33 %	5,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		37.33 %	5,000,000.00
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya</i>		1 Dokumen	5,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5,000,000.00

RENJA 2024

2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	<i>Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto</i>		57.86 %	244,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		57.86 %	251,320,000.00
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan pemerintah daerah di bidang PPLH</i>		25.83 %	244,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25.83 %	251,320,000.00
2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup								
		<i>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan</i>		2 Orang	25,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Orang	0.00
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		215 Laporan	209,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		215 Laporan	241,320,000.00
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH								

		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD</i>		5 Dokumen	10,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	10,000,000.00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Memiliki Pengetahuan di Bidang Lingkungan Hidup melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup</i>		16.43 %	255,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		16.43 %	275,000,000.00
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang diberikan kepada lembaga masyarakat di Kabupaten Mojokerto yang terselenggara</i>		100 %	255,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 %	275,000,000.00
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan								
		<i>Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH</i>		3 Lembaga	30,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Lembaga	50,000,000.00
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup								
		<i>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>		2 Dokumen	125,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	125,000,000.00
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup								

RENJA 2024

		<i>Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat</i>		50 Orang	100,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang	100,000,000.00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapat Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup</i>		49.00 %	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		49.00 %	50,000,000.00
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten yang terlaksana</i>		100 %	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 %	50,000,000.00
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								
		<i>Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH</i>		30 Entitas	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Entitas	50,000,000.00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Pesentase Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten yang Tertangani</i>		75.00 %	45,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		75.00 %	136,027,255.00

RENJA 2024

2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	<i>Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang terselesaikan</i>		85 %	45,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		85 %	136,027,255.00
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani</i>		2 Dokumen	40,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	121,027,255.00
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan</i>		1 Dokumen	5,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15,000,000.00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	<i>Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto</i>		99.00 %	11,353,600,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		99.00 %	8,717,542,900.00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	<i>Persentase Pengurangan sampah melalui 3R di Kab. Mojokerto Persentase sampah yang tertangani</i>		28 % 71 %	11,353,600,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		28 % 71 %	8,717,542,900.00
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota								

		<i>Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan</i>		2 Dokumen	135,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	267,000,000.00
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali</i>		2 Laporan	4,004,600,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	4,994,756,450.00
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>		222.070 Ton	2,769,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		222.070 Ton	2,583,000,000.00
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan								
		<i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>		50 Kelompok	320,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Kelompok	627,756,450.00
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota								

**RENJA 2024**

	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir</i>	26 Unit	4,125,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	26 Unit	245,030,000.00
J U M L A H			30,449,361,000.00			34,008,374,165.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto sesuai dengan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 disajikan pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1

Matriks Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATA TAN PENTI NG	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				30,449,361,000.00				34,008,374,165.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				30,449,361,000.00				34,008,374,165.00

RENJA 2024

2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				30,449,361,000.00				34,008,374,165.00
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	DLH KAB. MOJOKERTO	82,34 (A) nilai	13,611,086,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		83,14 (A) nilai	19,411,976,640.00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja PD Bernilai Baik		97 %	25,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		97 %	62,084,725.00
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	12,500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	21,854,540.00
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Laporan	12,500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Laporan	40,230,185.00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah		95 %	12,320,086,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		95 %	17,896,364,842.00
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		145 Orang/bulan	12,320,086,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		145 Orang/bulan	17,896,364,842.00

RENJA 2024

2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</i>		75.50 Indeks	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		75.50 Indeks	185,000,000.00
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>		1 Paket	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	120,000,000.00
2.11.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
		<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>		1 Dokumen	0.00			1 Dokumen	15,000,000.00
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>		3 Orang	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Orang	50,000,000.00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan</i>		98 %	285,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Paket	370,000,000.00
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		6 Paket	100,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Paket	130,000,000.00
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								

RENJA 2024

		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>		2 Paket	0.00			2 Paket	25,000,000.00
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>		15 Paket	15,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15 Paket	20,000,000.00
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>		7 Paket	15,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Paket	20,000,000.00
2.11.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material								
		<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>		4 Paket	40,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Paket	45,000,000.00
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>		12 Laporan	15,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	20,000,000.00
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		12 Laporan	100,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	110,000,000.00

RENJA 2024

2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi</i>		98 %	80,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	30,000,000.00
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>		2 Unit	0.00			2 Unit	30,000,000.00
2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>		4 Unit	80,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Unit	0.00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan</i>		100 %	476,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 %	486,000,000.00
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>		12 Laporan	260,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	270,000,000.00
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		12 Laporan	216,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	216,000,000.00

RENJA 2024

2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik</i>		100 %	375,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 %	382,527,073.00
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>		60 Unit	250,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60 Unit	250,000,000.00
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>		3 Unit	75,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	102,527,073.00
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>		30 Unit	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Unit	30,000,000.00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</i>		58.46 %	235,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		58.46 %	375,000,000.00

RENJA 2024

2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	<i>Persentase tersusunnya penetapan dan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>		69.89 %	195,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		69.89 %	335,000,000.00
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun</i>		4 Dokumen	140,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	265,000,000.00
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota</i>		106 Dokumen	55,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		106 Dokumen	70,000,000.00
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	<i>Persentase pembinaan penyelenggaraan KLHS yang terlaksana</i>		33 %	40,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		33 %	40,000,000.00
2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup								
		<i>Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun</i>		1 Dokumen	40,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	40,000,000.00

RENJA 2024

2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu Persentase Peningkatan Luas Lahan yang Terpulihkan</i>		53,19 % 9,60 %	1,359,650,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		53,19 % 9,60 %	1,482,180,640.00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Persentase peningkatan jumlah titik pantau kualitas air dan udara</i>		74.18 %	1,094,650,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		74.18 %	1,038,680,640.00
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								
		<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>		6 Dokumen	120,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Dokumen	265,000,000.00
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>		1 Dokumen	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	0.00
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan</i>		2 Dokumen	924,650,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	773,680,640.00

RENJA 2024

2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Prosentase jumlah wilayah terfasilitasi penanggulangan kondisi pencemaran/kerusakan lingkungan</i>		11,11%	125,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11,11%	176,000,000.00
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat								
		<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan</i>		2 Laporan	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	76,000,000.00
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								
		<i>Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan</i>		55 Titik	75,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		55 Titik	100,000,000.00
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Persentase peningkatan lahan kritis terpulihkan</i>		2.80%	140,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.80%	267,500,000.00
2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar</i>		1 Dokumen	40,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	35,000,000.00
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi								

RENJA 2024

		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi</i>		1 Dokumen	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	110,000,000.00
2.11.03.2.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi</i>		1 Dokumen	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	122,500,000.00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	<i>Persentase Luas Area Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Mojokerto yang Terkelola</i>		78.00 %	3,251,025,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		78.00 %	3,254,326,730.00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	<i>Persentase luas ruang terbuka hijau disetiap kecamatan yang terkelola</i>		78 %	3,251,025,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	3,254,326,730.00
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati								
		<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun</i>		1 Dokumen	76,025,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	75,000,000.00
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan								
		<i>Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		0.0835 Ha	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0.0835 Ha	50,000,000.00
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								

		<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		8.2 Ha	2,400,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8.2 Ha	2,581,346,751.00
2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati								
		<i>Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati</i>		80 Orang	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		80 Orang	50,000,000.00
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola</i>		1230 Unit	675,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1230 Unit	497,979,979.00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	<i>Persentase Penghasil B3 dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Terpantau Pengelolaannya</i>		100.00 %	45,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100.00 %	55,000,000.00
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	<i>Persentase penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau penyimpanannya</i>		62.66 %	40,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		62.66 %	50,000,000.00
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3								
		<i>Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3</i>		10 Laporan	40,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Laporan	50,000,000.00

RENJA 2024

2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau pengumpulan dan pengelolaan lebih lanjut</i>		37.33 %	5,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		37.33 %	5,000,000.00
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya</i>		1 Dokumen	5,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5,000,000.00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	<i>Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto</i>		57.86 %	244,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		57.86 %	251,320,000.00

RENJA 2024

2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan pemerintah daerah di bidang PPLH</i>		25.83 %	244,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25.83 %	251,320,000.00
2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup								
		<i>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan</i>		2 Orang	25,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Orang	0.00
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		215 Laporan	209,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		215 Laporan	241,320,000.00
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD</i>		5 Dokumen	10,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	10,000,000.00

RENJA 2024

2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Memiliki Pengetahuan di Bidang Lingkungan Hidup melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup</i>		16.43 %	255,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		16.43 %	275,000,000.00
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang diberikan kepada lembaga masyarakat di Kabupaten Mojokerto yang terselenggara</i>		100 %	255,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		100 %	275,000,000.00
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan								
		<i>Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH</i>		3 Lembaga	30,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		3 Lembaga	50,000,000.00
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup								
		<i>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>		2 Dokumen	125,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	125,000,000.00
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup								
		<i>Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat</i>		50 Orang	100,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		50 Orang	100,000,000.00

RENJA 2024

2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapat Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup</i>		49.00 %	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		49.00 %	50,000,000.00
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten yang terlaksana</i>		100 %	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 %	50,000,000.00
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								
		<i>Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH</i>		30 Entitas	50,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Entitas	50,000,000.00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Pesentase Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten yang Tertangani</i>		75.00 %	45,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		75.00 %	136,027,255.00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	<i>Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang terselesaikan</i>		85 %	45,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		85 %	136,027,255.00
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota								

RENJA 2024

		<i>Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani</i>		2 Dokumen	40,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	121,027,255.00
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan</i>		1 Dokumen	5,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15,000,000.00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	<i>Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto</i>		99.00 %	11,353,600,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		99.00 %	8,717,542,900.00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	<i>Persentase Pengurangan sampah melalui 3R di Kab. Mojokerto Persentase sampah yang tertangani</i>		28 % 71 %	11,353,600,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		28 % 71 %	8,717,542,900.00
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan</i>		2 Dokumen	135,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	267,000,000.00
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali								

RENJA 2024

		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali</i>		2 Laporan	4,004,600,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	4,994,756,450.00
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>		222.070 Ton	2,769,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		222.070 Ton	2,583,000,000.00
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan								
		<i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>		50 Kelompok	320,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Kelompok	627,756,450.00
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir</i>		26 Unit	4,125,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		26 Unit	245,030,000.00
J U M L A H					30,449,361,000.00				34,008,374,165.00

BAB V

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto ini secara umum telah berusaha melakukan perencanaan yang mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, serta mempertimbangkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Dinas Lingkungan Hidup ini

disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Semoga perencanaan awal yang telah disusun dapat terealisasi sepenuhnya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan selaras dengan kebijakan daerah khususnya pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup secara luas.

Mojokerto, Juni 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. ZAQQI

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19711019 199302 1 002